

**KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA**

**AGLANOVIANA W. NOYA  
FEMMY M.G TULUSAN  
DEISY L. TAMPONGANGOY**

[aglanoviana@gmail.com](mailto:aglanoviana@gmail.com)

**ABSTRAK:**

*Kinerja Sekretariat DPRD yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam pelayanan yang diberikan kepada seluruh anggota DPRD dan masyarakat terlihat ada beberapa indikasi kelemahan pada kualitas ataupun kompetensi SDM pegawai Sekretariat DPRD yaitu kurangnya profesionalitas kerja pegawai sekretariat DPRD dikarenakan tingkat latar belakang Pendidikan yang rendah dan kurang pengalaman kerja, tidak memiliki pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang memadai yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Temuan penelitian ini adalah bahwa Kinerja Sekretariat DPRD yang ada di Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif, efisien, adil dan daya tanggap dalam memberikan pelayanan yang ada kepada seluruh anggota DPRD namun kepada masyarakat masih harus ditingkatkan lagi dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan (skill) kepada seluruh staf dan pegawai dan berlaku adil dalam memberikan pelayanan yang ada kepada seluruh kalangan masyarakat tanpa membeda-bedakan suatu kalangan tertentu. Serta mempermudah proses atau prosedur dari proses administrasi yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.*

**Kata Kunci : Kinerja, Sekretariat DPRD**

*The performance of the DPRD Secretariat in North Sulawesi Province in the services provided to all DPRD members and the community, there are some indications of weaknesses in the quality or competence of DPRD Secretariat employees, namely the lack of professionalism of DPRD secretariat employees due to low educational background levels and lack of work experience. , do not have adequate technical and functional education and training needed to carry out the task. This research uses a qualitative approach. Data obtained from interviews, observations and documents. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of this study are that the performance of the DPRD Secretariat in North Sulawesi Province has been effective, efficient, fair and responsive in providing existing services to all DPRD members but to the community it still needs to be improved by providing training to improve skills for all members of the DPRD. staff and employees and act fairly in providing existing services to all levels of society without discriminating against a particular group. As well as simplifying the process or procedure of the administrative process at the DPRD Secretariat of North Sulawesi Province*

**Keywords: Performance, DPRD Secretariat**

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia (RI) adalah negara kesatuan yang berbentuk kepulauan membentang dari sabang sampai merauke, dengan wilayah dan daerah yang relatif cukup besar maka tidak mungkin urusan pemerintahan dapat diurus sendiri oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di suatu tempat. Pemerintahan di Indonesia sendiri menganut sistem perwakilan dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam sistem ini masing-masing masyarakat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sebagai bentuk dari perwakilan masyarakat tersebut dengan melakukan pemilihan umum (pemilu) disetiap daerah dengan demikian keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan dapat diwujudkan melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk tingkat pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah sebagai mitra yang sejajar Pemerintah Daerah. Dalam Struktur pemerintahan daerah, DPRD berada di dua jenjang, yaitu di tingkat provinsi disebut DPRD Provinsi serta di tingkat Kabupaten/kota disebut DPRD Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sesuai ketentuan Perundang-Undangan DPRD Provinsi mempunyai fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Ketiga fungsi tersebut dijalankannya sebagai tugas utamanya sebagai wakil rakyat, dalam konteks sebagai representasi rakyat di Daerah Provinsi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seyogianya bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, sehingga lahir suatu kebijakan atau peraturan daerah yang merupakan hasil penjangkaran dari

aspirasi masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD Provinsi diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah provinsi dan peraturan gubernur.

Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan lembaga pemerintah daerah yang mempunyai tugas sebagai pelaksana fungsi-fungsi pemerintah daerah. Dengan demikian DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Dengan Tri Fungsi DPRD yaitu fungsi dari legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

DPRD merupakan organisasi yang besar dan kompleks jadi tidak mungkin bagi para wakil rakyat bekerja sendirian oleh karenanya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD terkadang tidak dapat menjalankan dengan baik dan mencapai tujuan secara maksimal. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD tersebut maka dibentuklah Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD adalah pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka perlu melaksanakan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dipertegas dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yang merupakan unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD.

Sekretariat Dewan Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang 5 sangat berbeda dengan SKPD lainnya. Dalam

UU. No 23 Tahun 2014 Pasal 215 ayat (1), (2) dan (3) Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD Provinsi yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD Provinsi setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati melalui sekretaris daerah. Dalam lingkup masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui keberadaan sekretariat DPRD, padahal sekretariat DPRD memiliki tugas dan fungsi yang sangat berat dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD. Tugas Sekretariat DPRD cukup sulit karena pemerintahan daerah yang terdiri dari Eksekutif dan Legislatif dalam struktur pemerintahan, selalu bersama dalam kemitraan dan sebagaimana amanah Undang-undang. Kedua lembaga tersebut bertugas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terencana dan sistematis dengan program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Maka dari itu, sebagai penghubung antara legislatif dan eksekutif, sekretariat DPRD diharapkan bisa memiliki kenerja yang optimal untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah itu sendiri.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Fungsi Sekretariat DPRD, yang pertama penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan

rapat-rapat DPRD, dan yang terakhir penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

Kita tahu bahwa Sekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sangat penting untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari DPRD, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan program Sekretariat DPRD diperlukan juga penataan organisasi dan kerja serta peningkatan kapasitas SDM pegawai tersebut, agar dapat mewujudkan kinerja yang optimal dari Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikasi kelemahan pada kualitas ataupun kompetensi SDM pegawai Sekretariat DPRD yaitu kurangnya profesionalitas kerja pegawai sekretariat DPRD dikarenakan sebagian pegawai hanya berpendidikan SMA/ sederajat dan kurang pengalaman kerja, tidak memiliki pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang memadai yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas. Sekretariat DPRD provinsi Sulawesi Utara sendiri dituntut untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan demokratis dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD. Kelemahan lain ialah anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan operasional dirasakan belum mencukupi dan koordinasi antar unit organisasi ataupun dengan pihak DPRD seringkali tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Indikasi masalah yang terjadi membuat koordinasi antar unit organisasi ataupun dengan pihak DPRD seringkali tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Disebabkan kurangnya sumber daya manusia dari pegawai mempengaruhi unit/satuan organisasi yang ada di lingkungan sekretariat DPRD Provinsi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal serta masih adanya program dan kegiatan dari beberapa

unit/satuan organisasi yang tidak dapat mencapai target hasil maksimal seperti yang ditetapkan dalam rencana strategis. Kenyataan tersebut dapat mengindikasikan belum terwujudnya secara optimal kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang tentu dapat berpengaruh terhadap kemampuan sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, responsive, dan akutabel dalam menunjang fungsi DPRD agar terlaksana dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu di bidang studi kebijakan publik khususnya untuk kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut Kumorotomo dalam Dwiyanto, dkk (2002) mengemukakan empat indikator pengukuran terhadap kinerja organisasi publik, yaitu:

- a. Efisiensi; menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi mendapatkan keuntungan, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi.
- b. Efektivitas; menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, dan tujuan organisasi;
- c. Keadilan; menyangkut distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.
- d. Daya Tanggap; menyangkut daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan.

Menurut Suyadi Prawirosentono (2008) "Kinerja atau dalam bahasa Inggris adalah performance", yaitu: hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

DPRD menurut Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu.

Sekretariat berdasarkan Saiman (2002:31), sekretariat merupakan suatu daerah di mana terjadinya kegiatan kerja yang sifatnya tetap pada suatu kantor atau suatu daerah tertentu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam mencantumkan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan dari segi teori maupun konsep :

Pertama oleh Jecica Nansi Sahala, Salmin Dengo, Very Y. Londa (2015): *The Performance of Sekretariat DPRD to Appreciation the Implementation of function DPRD North Sulawesi Province*. Permasalahan ini berangkat dari terdapat beberapa indikasi kelemahan pada kualitas ataupun kompetensi SDM pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yaitu sebagian pegawai hanya berpendidikan SMA/ sederajat dan kurang dalam pengalaman kerja, dan tidak memiliki pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional yang memadai yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas. Kelemahan lain ialah anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan operasional dirasakan belum mencukupi. Koordinasi antar unit organisasi ataupun dengan pihak DPRD seringkali tidak berjalan efektif sebagaimana mestinya. Dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang

penataan organisasi dan kerja serta peningkatan kapasitas SDM pegawai di Sekretariat DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jumlah seluruh informan direncanakan sebanyak 10 orang terdiri dari: (1) unsur Sekretariat DPRD: Sekretaris Dewan (1 orang), Kepala Bagian/Sub Bagian (4 orang), Staf/Pelaksana (1 orang). Jumlah informan dari unsur Sekretariat DPRD sebanyak 6 orang. (2) Unsur DPRD: Pimpinan Dewan (1 orang), Pimpinan Komisi (1 orang), Pimpinan Fraksi (1 orang), Anggota Badan Legislasi (1 orang). Jumlah informan dari unsur DPRD sebanyak 4 orang. Berdasarkan penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan memiliki banyak kesamaan dengan penelitian ini, dimana sama-sama membahas tentang kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan sama-sama penelitian ini dilakukan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Perbedaan antara penelitian ini dengan yang di teliti yaitu dari fokus penelitiannya.

Kedua oleh Ofin Niwi Lingawe, Patar Rumampea, Salmin Dengo (2014): Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kampung Kiliarma Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Propinsi Papua. Permasalahan ini berangkat dari kinerja Pemerintah Desa Kiliarma dalam pelayanan publik masih banyak kelemahan baik pada aspek efektivitas pelayanan, efisiensi pelayanan, responsivitas pelayanan, dan kualitas layanan. Kelemahan pada aspek efektivitas dapat dindikasikan oleh ketidakmampuan pemerintah desa dalam mengembangkan dan melaksanakan program pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintah desa. Berdasarkan dari penelitian terdahulu ini sama-sama mengkaji tentang kinerja, memiliki perbedaan dalam jenis penelitian peneliti ini memakai metode penelitian deskriptif sedangkan yang peneliti memakai metode kualitatif.

Ketiga oleh Cassandra Corneles, Femmy Tulusan, Verry Londa (2019): Kinerja Sekretariat Desa Dalam Penataan Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara). Penelitian ini bertolak dari masalah penempatan Sekretaris Desa yang tidak sesuai dengan kemampuannya kadang menimbulkan penurunan kinerja. Penurunan kinerja aparatur dalam suatu organisasi umumnya dipengaruhi oleh pola penempatan orang-orang yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Lemahnya dan rendahnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan Administrasi pada satu sisi dapat dipahami bahwa Sekertaris Desa sebagai pelayan publik masih mengalami ketidakefektivan dan ketidakberdayaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan dari penelitian terdahulu ini sama-sama mengkaji tentang kinerja dan sama-sama juga dalam penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Keempat oleh Jacklin Lumi, Martha Ogotan, Deysi Tampongangoy (2018): Pengaruh Kinerja Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Permasalahan bertolak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang merupakan instansi pelaksana pelayanan dalam urusan administrasi di kabupaten Minahasa. Dari studi pendahuluan (prasurvei) yang dilakukan diperoleh gambaran awal bahwa kinerja dinas ini dalam pelayanan publik masih belum maksimal, baik dalam hal pelayanan dokumen kependudukan (Kartu Keluarga dan KTP), pelayanan surat keterangan (surat keterangan pindah atau datang; surat keterangan kelahiran, kematian, dan surat keterangan lainnya), maupun dalam pelayanan akta pencatatan sipil (akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, dan akta lainnya). Kinerja yang belum

maksimal ini ditunjukkan antara lain dengan hasil kerja yang tidak maksimal, pelaksanaan pelayanan kurang responsif dan kurang transparan, dan penyelesaian pelayanan yang tidak tepat waktu.

Kinerja pelayanan yang belum maksimal tersebut dapat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa. Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Berdasarkan dari penelitian terdahulu ini sama-sama mengkaji tentang kinerja dan yang membuat penelitian ini berbeda, peneliti menggunakan penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif.

Kelima oleh Brian Felliciano Manansal (2014): Kinerja Pegawai Di Sekretariat DPRD Kota Bitung. Permasalahan bertolak dari kinerja pegawai di sekretariat DPRD Bitung sebagai daerah otonom, kinerja pegawai pemerintahan Kota Bitung dibutuhkan aparatur pemerintahan yang berdedikasi tinggi dan memiliki disiplin tinggi serta kinerja yang baik, seperti Sekretariat DPRD Kota Bitung yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, yaitu dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Berdasarkan dari penelitian terdahulu ini sama-sama mengkaji tentang kinerja dan menggunakan penelitian kualitatif, yang membuat penelitian ini berbeda, yaitu dari focus penelitian yang digunakan.

Keenam oleh Halmintje Makawimbang Patar Rumapea Joorie Ruru (2015): Kinerja Lembaga Penyiaran Publik

Radio Republik Indonesia (Studi Tentang Kinerja Pegawai di Lembaga Penyiaran Publik RRI Manado) Permasalahan bertolak dari kinerja pegawai pada bidang tenaga kerja secara umum sudah baik, namun disamping itu masih terdapat beberapa kekurangan yang harus segera diatasi agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan lagi. Masalah-masalah seperti kuantitas pegawai yang masih dinilai kurang untuk menunjang penyelesaian tugas dan pekerjaan pada masing-masing seksi di bidang tenaga kerja. Pada tugas jabatan fungsional, belum adanya tenaga pengawas yang berfungsi mengawasi perusahaan-perusahaan terkait ketenagakerjaan dan juga mediator yang berfungsi sebagai penghubung dan melakukan mediasi antara pengusaha, perusahaan dan tenaga kerja serta masalah kinerja pegawai yang masih perlu ditingkatkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian deskriptif, dengan total 9 koresponden. Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang kinerja, yang membedakan penelitian ini adalah focus yang digunakan dan lokasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sesuai ketentuan Perundang-Undang DPRD Provinsi mempunyai fungsi yakni Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan kemudian dipertegas dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Sekretariat DPRD adalah “perangkat daerah” yang merupakan unsur “pelayanan administrasi” terhadap DPRD.

Sebagaimana dengan konsep kinerja dari A.A. Prabu Mangkunegara (2000), yang mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang

telah dicapai dari apa yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau tugas. Kinerja merupakan prestasi kerja atau performance, yaitu hasil kerja selama periode tertentu dibanding dengan berbagai kemungkinan. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut peneliti Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang berfokus pada efektivitas, efisiensi, keadilan, dan daya tanggap. Sejalan dengan teori dari Kumorotomo dalam Dwiyanto, dkk (2002) yaitu yang pertama efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi mendapatkan keuntungan, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Yang kedua efektivitas menyangkut rasionalitas teknis, nilai, misi, dan tujuan organisasi. Yang ketiga keadilan menyangkut distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Dan yang terakhir daya tanggap menyangkut daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat, dan dapat dipertanggung jawabkan secara transparan.

Berdasarkan hasil penelitian, yang ada terhadap Kinerja Sekretariat DPRD ditemukan beberapa fokus yakni sebagai berikut:

#### 1. Efisien

Berdasarkan hasil penelitian yang ada ditemukan bahwa fasilitas yang ada di Sekretariat DPRD sudah mendukung sehingga proses pelayanan sudah berjalan dengan baik dan efisien. Hal ini menunjuk pada semua fasilitas yang ada di sekretariat DPRD sudah menunjang dan memberikan pengaruh yang baik untuk menunjang kinerja pegawai yang ada karena dengan adanya fasilitas yang mendukung baik itu sarana maupun prasarana yang ada yang bisa

digunakan oleh semua pegawai yang ada baik itu staf, pegawai, pejabat struktural, dan para anggota DPRD yang ada. Atas semua fasilitas tersebut kinerja sekretariat DPRD yang ada di Sulawesi Utara sudah efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang ada karena fasilitas merupakan hal yang penting untuk menunjang keberhasilan dari setiap kinerja dalam menjalankan tugas yang diberikan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Jessica Sahala yaitu tingkat efisiensi cukup baik dilihat dari penggunaan anggaran untuk digunakan dalam membangun fasilitas yang ada. Sejalan juga dengan teori dari Gibson dkk, (1998) ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan, misalnya: perbandingan antara hasil kerja dengan biaya atau dengan waktu atau dengan tenaga yang dipergunakan untuk menghasilkan hasil itu.

Oleh karena itu, efisiensi mempengaruhi kinerja pegawai sekretariat DPRD yang mempunyai fungsi dalam mendukung pelaksanaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara sehingga semakin meningkat, karena adanya sumber daya yang efisien mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD.

#### 2. Efektivitas

1) Berdasarkan hasil penelitian, kinerja pegawai yang ada di Sekretariat DPRD sudah profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga sudah mencapai tingkat kesuksesan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini dinilai dari cara mereka memberikan pelayanan yang ada baik kepada anggota DPRD juga kepada masyarakat yang ada. Dalam hal ini kita bisa melihat seberapa besar rasa tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretariat DPRD dalam membantu serta mendukung pelaksanaan yang ada dalam hal administrasi yang ada. Tenaga-tenaga yang ada di sekretariat DPRD adalah tenaga-tenaga yang

professional dalam bidangnya. Namun tanpa dipungkiri ada masih ada beberapa pegawai yang latar belakang pendidikannya sekolah menengah atas dibandingkan dengan yang berlatar belakang Pendidikan strata 1/sarjana. Hal ini yang membuat kinerja sekretariat DPRD bisa dikatakan belum sepenuhnya professional dalam hal latar belakang pendidikan yang ada dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah tetapi bisa dikatakan professional dalam hal skill (kemampuan) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terlebih anggota DPRD yang ada.

Hal ini sejalan dengan teori dari Gibson dkk (1994) mengenai kinerja yang berhasil dalam menyelesaikan tugas, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu dari Jessica Sahala tentang kinerja pegawai yang memiliki tingkat efektivitas cukup baik dilihat dari keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2) Berdasarkan hasil penelitian sehubungan dengan kinerja pegawai yang ada di Sekretariat DPRD sudah disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab oleh karena dipengaruhi dengan gaya kepemimpinan yang ada di Sekretariat DPRD, sehingga mempengaruhi kinerja pegawai yang ada. Hal ini berdampak pada efektivitas dalam pemberian pelayanan dari Sekretariat DPRD terhadap masyarakat terlebih kepada anggota DPRD yang ada. Disiplin kerja sangat besar manfaatnya, bagi kepentingan organisasi maupun bagi para pegawai. #

Dalam menegakkan kedisiplinan kerja dengan mengadakan aturan-aturan yang harus ditaati, membuat para pegawai dan staf Sekretariat DPRD mempunyai tingkat disiplin yang cukup baik. Hal ini juga terlihat dari kedisiplinan yang diterapkan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),

yang berkepribadian tegas dan disiplin dalam menjalankan tugasnya dan memberikan contoh serta teladan yang baik kepada para pegawai yang ada. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa kepemimpinan mencerminkan teladan bagi para pegawai yang ada untuk dijadikan contoh.

Hal ini juga berhubungan dengan penelitian terdahulu dari Brian Manansal yang menyatakan bahwa kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang amat penting dalam keberhasilan kinerja suatu instansi. Dalam upaya melaksanakan kepemimpinan yang efektif, seorang pemimpin sebaiknya menentukan gaya kepemimpinan atau pola kepemimpinan yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Sejalan juga dengan teori dari Hasibuan 2013 Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya, agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan.

3) Berdasarkan penelitian di sekretariat DPRD adanya kekurangan tenaga non ahli, seperti supir dan penjaga keamanan sehingga menimbulkan ketidak efektifitasan dalam hal kinerja tenaga non ahli tersebut. Perlunya perhatian lebih terhadap tenaga non ahli ini agar dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan anggota DPRD dapat berjalan dengan baik, contohnya perlunya supir untuk mengantar anggota DPRD yang ada untuk dinas keluar kota bahkan dalam kota ketika mereka akan melaksanakan program kunjungan ke suatu daerah atau program lainnya. Sehingga pelaksanaan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan efektif tanpa ada hambatan dalam hal teknis yang mengganggu berjalannya suatu pelayanan yang ada terlebih khusus dalam hal kegiatan atau program yang berada di luar kantor sekretariat DPRD Sulawesi Utara yang ada, agar kegiatan program tersebut tidak mengalami hambatan dalam hal kekurangan tenaga non ahli.

Contoh selanjutnya yaitu perlunya tenaga keamanan di Kantor DPRD yang ada karena masih kurangnya tenaga tersebut membuat pelayanan yang ada untuk menjaga fasilitas juga sarana dan prasarana yang ada di kantor sekretariat DPRD. Tenaga ahli diperlukan tetapi diperlukan juga tenaga non ahli untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan tujuan dari Sekretariat DPRD karena tenaga non ahli dan tenaga ahli yang ada sama pentingnya untuk menunjang efektivitas kinerja yang ada di sekretariat DPRD maka dari itu, hal ini sangat diperlukan sehingga dalam hal menunjang efektivitas kinerja pegawai yang ada dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Karena semakin tingginya efektivitas pegawai yang ada maka semakin tinggi juga kesuksesan dari organisasi/instansi yang berkaitan.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Jessica Sahala dimana kekurangan sumber daya manusia yang ahli dalam potensi bidang tertentu yang membuat efektivitas kinerja belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Sejalan juga dengan konsep teori dari Soeprihanto (2001) kinerja sumber daya manusia dikatakan baik apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan yang ditetapkan. Itu berarti sumber daya manusia telah mampu menjalankan program atau aktivitas yang tepat dan dapat dikatakan kinerjanya sudah efektif.

Oleh karena itu, efektivitas mempengaruhi kinerja pegawai sekretariat DPRD yang mempunyai fungsi dalam mendukung pelaksanaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara sehingga semakin meningkat, karena adanya sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat DPRD.

### 3. Keadilan

1) Berdasarkan hasil penelitian yang ada dalam pemberian pelayanan yang adil kepada anggota DPRD sangat penting, namun terdapat kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada dalam hal menyampaikan aspirasi dari masyarakat

tersebut kepada anggota DPRD yang ada. Karena tanpa dipungkiri masih ada beberapa masyarakat yang didahulukan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD yang ada, masyarakat yang dimaksud disini ialah masyarakat yang berasal dari kalangan atas. Berdasarkan fakta yang ada, dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kalangan atas, ketika mereka menyampaikan aspirasi yang ada mereka tidak dipersulit oleh prosedur dalam hal administrasi sehingga dalam proses pelayanannya lebih cepat ditindaklanjuti karena tidak dihalangi oleh prosedur-prosedur yang rumit dibandingkan dengan prosedur yang dialami atau dilalui oleh masyarakat kalangan menengah kebawah. Menurut peneliti hal ini yang harus diperbaiki agar adanya keadilan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa dibedakan berdasarkan kalangan yang ada. Sehingga benar-benar masyarakat juga merasakan proses pelayanan yang diberikan oleh kinerja pegawai yang ada di sekretariat DPRD.

Kinerja sekretariat DPRD di Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat bagus dalam pemberian pelayanan kepada anggota DPRD, tanpa melihat kepada siapa yang akan diberikan pelayanan baik itu kepada ketua, komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. bahkan sebagai penerima pelayanan yang ada anggota DPRD sangat mengapresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kinerja dari pegawai dan staf dari sekretariat DPRD dalam mereka memberikan pelayanan yang maksimal kepada seluruh anggota DPRD untuk menunjang tugas dan fungsi DPRD.

Hal ini sejalan dengan teori dari Magnis Suseno yaitu keadilan sebagai kondisi ataupun keadaan manusia yang diperlakukan sama rata atau setara, yang sebanding dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

2) Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dalam hal adil memberikan sanksi kepada semua pegawai yang melanggar aturan yang

ada, hal ini bermaksud untuk menciptakan kinerja pegawai yang berkualitas, yang dapat mematuhi aturan. Sanksi ini juga berkaitan dengan masalah dalam pelanggaran kode etik yang ada karena hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis. Sangat diharapkan dalam hal ini setiap individu yang ada di sekretariat DPRD dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan diharapkan benar-benar memahami suatu peraturan yang ada sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar tanpa melakukan pelanggaran agar tidak dijatuhi sanksi tertentu.

Seperti contoh dalam hal keterlambatan, pegawai/staf yang terlambat ketika datang ke kantor akan mendapat sanksi berupa potongan gaji. Kedisiplinan dari pegawai dan staf sangat dijunjung tinggi di kantor Sekretariat DPRD agar kinerja dari sekretariat DPRD semakin hari semakin meningkat. Mengingat juga sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) haruslah memberikan pelayanan yang bagus.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Brian Manansal yaitu dimana perilaku disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Sejalan juga dengan teori dari Thomas Hubbes tentang setiap perbuatan yang dikatakan adil hanya tercipta ketika apa yang telah dikerjakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat ataupun disepakati sebelumnya.

#### 4. Daya Tanggap

1) Berdasarkan hasil penelitian yang ada mengenai kerja sama yang baik antar semua kinerja pegawai yang ada baik itu staf, pejabat structural, serta anggota DPRD yang ada sehingga tujuan organisasi tercapai. Tentunya kerja sama adalah factor yang penting dalam mencapai suatu tujuan suatu instansi yang di dalamnya, membutuhkan kerjasama yang baik antar para pegawainya agar boleh tercipta tujuan yang ingin dicapai instansi tersebut. Hal ini dapat kita lihat di sekretariat DPRD

Sulawesi Utara bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian pelayanan mereka saling berkoordinasi dan memiliki komunikasi yang baik sehingga kerja sama yang ada antara semua pegawai sekretariat DPRD dan anggota DPRD berjalan dengan baik.

Apalagi sekretariat DPRD mempunyai tugas dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD yang ada, disini kita bisa lihat bahwa adanya komunikasi yang baik antar pegawai sekretariat DPRD dengan para anggota DPRD yang ada. Komunikasi ini sangat berpengaruh untuk menjalin suatu kerja sama yang baik agar dapat mencapai tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Brian Manansal yaitu kerjasama dalam suatu organisasi dilakukan agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat berjalan dengan sistematis. Sejalan juga dengan teori dari Charles H. Cooley yang berpendapat bahwa kerja sama akan timbul jika orang menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan yang sama serta kesadaran atas diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut.

2) Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD berbelit-belit atau rumit dalam hal administrasi sehingga menghambat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Hal ini dilihat dari sulitnya dalam mengurus administrasi yang ada berdasarkan dengan yang peneliti temui di lapangan bahwa dalam proses pelaksanaan administrasi, sangat berbelit-belit dikarenakan prosedur yang memang ada di sekretariat DPRD. Hal ini yang membuat peneliti menyayangkan hal tersebut karena proses tersebut membuang-buang waktu, dana dan tenaga secara percuma.

Jika prosedur dalam hal administrasi ini dipermudah maka menurut peneliti proses penyampaian aspirasi dari masyarakat lebih cepat diketahui dan dapat ditindak lanjuti oleh

para anggota DPRD yang ada, seperti ketika mereka sedang mengadakan sidang rapat dengar pendapat mereka dapat langsung mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang terbaik untuk menindaklanjuti suatu isu yang sedang terjadi di kalangan masyarakat atau daerah tertentu atas pengajuan dari aspirasi masyarakat tersebut. Disini sangat diperlukan kinerja yang memiliki daya tanggap yang cekatan dalam melaksanakan proses pelayanan sehubungan dengan aspirasi masyarakat yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari Ofin Lingawe yaitu kelemahan kinerja pada aspek responsivitas dalam menanggapi atau memenuhi harapan atau tuntutan masyarakat secara cepat dan tepat. Sejalan juga dengan teori dari menurut Fx. Soedjadi (1989) tentang administrasi adalah kegiatan prosedur usaha kantor (catatan, mengetik, menggandakan, dan sebagainya).

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di paparkan tentang kinerja sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan focus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efisiensi dari kinerja Sekretariat DPRD ini merujuk pada fasilitas yang menunjang kinerja pegawai yang ada, baik itu sarana maupun prasarana yang disediakan dan bisa digunakan oleh semua pegawai, staf, pejabat structural, dan para anggota DPRD. Dengan adanya fasilitas yang efisien tersebut kinerja pegawai dan staf yang disediakan itu diharapkan bisa membantu pegawai dan staf yang ada agar pelaksanaan kinerja dari sekretariat DPRD berjalan dengan efisien dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terlebih khusus kepada anggota DPRD yang ada.
2. Efektivitas dari kinerja Sekretariat DPRD ini adalah pertama, professional

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sehingga sudah mencapai tingkat kesuksesan dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kinerja sekretariat DPRD bisa dikatakan belum sepenuhnya professional dalam hal pendidikan dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah tetapi bias dikatakan professional dalam hal skill (kemampuan) untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kedua, kinerja pegawai yang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab karena dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dari Sekretaris DPRD yang berkepribadian tegas dan disiplin, membuat para pegawai dan staf menjadikannya contoh dan teladan. Ketiga, kinerja pegawai sekretariat kekurangan tenaga non ahli, seperti supir dan penjaga keamanan sehingga menimbulkan ketidak efektifitasan dalam hal kinerja non ahli.

3. Keadilan dari kinerja sekretariat DPRD ini adalah pertama pemberian pelayanan yang adil kepada seluruh anggota DPRD, namun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada dalam hal menyampaikan aspirasi dari masyarakat tersebut kepada anggota DPRD yang ada masih terlihat adanya perbedaan dalam memberikan pelayanan. Keadilan yang kedua dari kinerja sekretariat DPRD adalah adil dalam memberikan sanksi kepada semua pegawai yang melanggar aturan yang ada, hal ini bermaksud untuk menciptakan kinerja pegawai yang berkualitas, yang dapat mematuhi aturan yang ada.
4. Dalam hal daya tanggap dari kinerja sekretariat DPRD adalah yang pertama dengan adanya kerja sama yang baik antar semua kinerja pegawai yang ada baik itu staf, pejabat structural, serta anggota DPRD yang ada sehingga tujuan organisasi sudah tercapai. Dalam hal

daya tanggap yang kedua dari kinerja sekretariat DPRD ialah prosedur pelayanan yang ada di Sekretariat DPRD dalam hal administrasi masih berbelit-belit atau rumit sehingga menghambat masyarakat dalam menyampaikan aspirasi yang ada kepada anggota DPRD.

#### SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran untuk Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan (skill) kepada seluruh staf dan pegawai yang ada Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara
2. Mengantisipasi kekurangan tenaga non ahli dengan membuka lowongan pekerjaan sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menunjang Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang efektif
3. Berlaku adil dalam memberikan pelayanan yang ada kepada seluruh kalangan masyarakat tanpa membedakan suatu kalangan tertentu.
4. Mempermudah proses atau prosedur dari proses administrasi yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara

#### DAFTAR PUSTAKA

- Corneles, C. Tulusan, F. Londa, V. 2019. Kinerja Sekretariat Desa Dalam Penataan Administrasi Desa (Studi Kasus Di Desa Gangga Satu Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara)
- Dwiyanto, A. 2012. Manajemen Pelayanan Publik Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Halmintje, M. Patar, R. Joorie, R. 2015. Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Studi

Tentang Kinerja Pegawai di Lembaga Penyiaran Publik RRI Manado)

- Kosarina, Sumarsono. 2015 Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Suatu Studi Di Kelurahan Tingkulu Kota Manado)
- Lumi, J. Ogotan, M. Tampongogoy, D. 2018. Pengaruh Kinerja Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa
- Lingawe, O.N. Rumampea, P. Dengo, S. 2014. Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kampung Kiliarma Distrik Agimuga Kabupaten Mimika Propinsi Papua.
- Manansal, B. 2014. Kinerja Pegawai Di Sekretariat DPRD Kota Bitung
- Masengi E. 2008. Manajemen Pelayanan Publik, Malang: Wineka Media.
- Mangkunegara, Prabu, A. 2005. Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moleong. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Redoskarya .
- Harbani, H. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Siagain, M. Pangkey, M. Rares, J. 2015. Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Sulawesi Utara
- Sahala, J. Dengo, S. Londa Very, Y. 2015. The Performance of Secretariat DPRD to Appreciation the Implementation of function DPRD North Sulawesi Province.
- Sudarmanto. 2008. Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, A. 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Publik. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta

Sumber-sumber lainnya:

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang  
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014  
(Pasal 375) tentang Majelis  
Permusyawaratan Rakyat, Dewan  
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009  
tentang Majelis Permusyawaratan  
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,  
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah

PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat  
Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104  
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis  
Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara  
Nomor 4 Tahun 2018 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat  
Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi  
Sulawesi Utara.

PERGUB Nomor 31 Tahun 2020 tentang  
Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata  
kerja Sekretariat DPRD Provinsi  
Sulawesi Utara.